

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa "Mutiara Welirang" dalam Meningkatkan Daya Saing Desa Wisata Berbasis *Good Governance* di Desa Ketapanrame

Windriyani Maharani Senaen^{1*}, Sela Ajeng Triangraini², Lunariana Lubis³,
Moh. Musleh⁴

^{1,2,3,4}Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the application of good governance principles in the management of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) "Mutiara Welirang" in Ketapanrame Village, which focuses on improving the competitiveness of the tourism village. This research uses a qualitative approach with a case study to understand how principles such as consensus, participation, accountability, transparency, and sustainability are applied in the management of the BUMDes. The results show that most of the principles of good governance are well implemented, especially in the aspects of community participation and decision-making through village deliberation. However, challenges still exist in the aspects of transparency and accountability, especially in terms of the accessibility of financial information for the community. In addition, limited human resources in management and funds for infrastructure development are major constraints in improving the competitiveness of tourism villages. This research suggests that BUMDes should improve the capacity of managers through managerial training, strengthen transparency, and seek alternative funding sources to support the development of tourism village infrastructure. Optimal implementation of good governance principles can assist BUMDes in creating sustainable, efficient and competitive tourism villages in the future.

Keywords: bumdes, good governance, ketapanrame village, tourism village

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Mutiara Welirang" di Desa Ketapanrame, yang berfokus pada peningkatan daya saing desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip seperti konsensus, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan diterapkan dalam pengelolaan BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip *good governance* diterapkan dengan baik, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Namun, tantangan masih ada dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal aksesibilitas informasi keuangan bagi masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam manajemen dan dana untuk pengembangan infrastruktur menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing desa wisata. Penelitian ini menyarankan agar BUMDes meningkatkan kapasitas pengelola melalui pelatihan manajerial, memperkuat transparansi, serta mencari sumber pendanaan alternatif untuk mendukung pengembangan infrastruktur desa wisata. Implementasi prinsip *good governance* secara optimal dapat membantu BUMDes dalam menciptakan desa wisata yang berkelanjutan, efisien, dan kompetitif di masa depan.

Kata kunci: bumdes, desa ketapanrame, desa wisata, good governance

* windrimaharani@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan keberagaman budaya, alam, dan sosialnya, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pada kekuatan lokal, seperti desa wisata. Salah satu bentuk inisiatif yang mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat desa adalah keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak bagi kemajuan ekonomi desa, melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan (Astuti et al., 2022).

BUMDes menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan ekonomi desa di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes diberikan mandat untuk mengelola potensi desa, baik berupa sumber daya alam, sosial, maupun ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Andriyanti et al., 2024; Devina et al., 2024). Seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata di Indonesia, BUMDes berperan penting dalam pengelolaan desa wisata yang tidak hanya berdampak pada perekonomian desa, tetapi juga memperkuat daya saing desa tersebut di tingkat nasional maupun internasional (Prasetyo & Sukmana, 2024). Salah satu contoh keberhasilan pengelolaan

BUMDes dalam sektor pariwisata adalah BUMDes "Mutiara Welirang" yang terletak di Desa Ketapanrame, yang menjadi model dalam mengelola desa wisata berbasis *good governance*.

Desa Ketapanrame adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, termasuk area pegunungan yang dikenal dengan keindahan alamnya. Meskipun memiliki potensi tersebut, desa ini dihadapkan pada tantangan dalam mengelola sumber daya yang ada, baik dari sisi finansial, sumber daya manusia, maupun kapasitas kelembagaan. Pada saat ini, peran BUMDes menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai lembaga ekonomi yang dapat memberikan pendapatan bagi desa, tetapi juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola BUMDes akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan daya saing Desa Ketapanrame di industri pariwisata (Muhaimin, 2019).

Penerapan *good governance* dalam pengelolaan BUMDes penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tersebut transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak BUMDes di Indonesia adalah kurangnya kapasitas dalam hal manajemen, perencanaan, dan evaluasi kinerja yang efektif (Afero et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana BUMDes "Mutiar Welirang" di Desa Ketapanrame dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam operasionalnya untuk meningkatkan daya saing desa wisata tersebut.

Peningkatan daya saing desa wisata berbasis sumber daya lokal sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengelolaan BUMDes. BUMDes yang memiliki tata kelola yang baik akan mendorong pengelolaan yang efisien dan efektif, serta dapat berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan usaha akan meningkatkan keberlanjutan ekonomi desa (Pertiwi et al., 2023). Dalam konteks ini, tata kelola yang baik dapat mencakup perencanaan yang matang, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pelaporan yang transparan. Kurniasih dan Setyoko (2019) menambahkan bahwa kapasitas pemerintahan yang baik dalam mengelola BUMDes dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan sumber daya desa, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing desa tersebut dalam sektor pariwisata.

Sementara itu, Afrizal (2023) menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas BUMDes, yang dalam konteks Desa Ketapanrame, sangat berkaitan dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan kapasitas manajerial BUMDes dalam mengelola desa wisata. Penelitian oleh Armi (2023) juga memberikan perspektif mengenai bagaimana BUMDes dapat berfungsi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan berbasis komunitas, yang merupakan aspek penting dalam pengembangan desa wisata.

Walaupun banyak penelitian sebelumnya yang telah membahas mengenai peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi desa, serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaannya, penelitian terkait BUMDes di desa wisata dengan fokus pada peningkatan daya saing melalui *good governance* di Desa Ketapanrame masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengisi kekosongan (research gap) tersebut, dengan meneliti secara spesifik

bagaimana tata kelola BUMDes dalam konteks desa wisata dapat mendorong peningkatan daya saing desa berbasis pada prinsip-prinsip *good governance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Mutiara Welirang" dapat meningkatkan daya saing Desa Ketapanrame sebagai desa wisata berbasis good governance?*

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tata kelola BUMDes "Mutiara Welirang" dalam meningkatkan daya saing Desa Ketapanrame sebagai desa wisata berbasis *good governance*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh BUMDes dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* serta memberikan rekomendasi bagi pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi desa wisata melalui pengelolaan BUMDes yang efektif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis, baik untuk pengembangan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa maupun untuk pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan. Dengan

menganalisis peran tata kelola BUMDes dalam konteks ini, diharapkan dapat ditemukan model terbaik untuk meningkatkan daya saing desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan yang transparan serta akuntabel.

METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Creswell & Poth, 2016) dengan pendekatan studi kasus (Yin, 2008) pada BUMDes "Mutiara Welirang" di Desa Ketapanrame, yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan desa wisata. Penelitian kualitatif dipilih karena jenis data yang diperlukan adalah data yang bersifat deskriptif, mendalam, dan terkait dengan fenomena sosial yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan tata kelola BUMDes dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi secara rinci dan mendalam mengenai satu objek yang spesifik, yaitu BUMDes "Mutiara Welirang", untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik terkait praktik *good governance* dalam konteks desa wisata.

Subjek penelitian ini terdiri dari para pengelola BUMDes "Mutiara Welirang", anggota masyarakat desa,

dan pemangku kepentingan terkait yang terlibat langsung dalam pengelolaan desa wisata. Sampel penelitian akan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki informasi yang relevan dan mendalam mengenai pengelolaan BUMDes dan desa wisata. Informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance*, tantangan yang dihadapi, serta dampak pengelolaan BUMDes terhadap daya saing desa wisata.

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari informan mengenai pengelolaan BUMDes dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam konteks desa wisata. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan untuk memberikan penjelasan secara lebih bebas dan mendalam mengenai pengalaman mereka dalam pengelolaan BUMDes dan desa wisata.

Observasi lapangan secara menyeluruh juga dilakukan untuk memahami kondisi lapangan secara langsung dan mengamati praktik-praktik yang diterapkan dalam pengelolaan desa wisata. Observasi ini melibatkan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari di desa wisata, seperti pengelolaan fasilitas pariwisata, interaksi antara pengelola dan wisatawan, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam BUMDes yang melibatkan masyarakat desa.

Selain itu, dokumentasi seperti laporan keuangan BUMDes, dokumen perencanaan pengelolaan desa wisata, dan hasil-hasil musyawarah desa juga akan digunakan untuk mendalami penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan untuk memperoleh data tambahan yang dapat memperkaya analisis.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) yang ditemukan dalam data kualitatif yang terkumpul. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara yang kemudian dianalisis untuk menemukan tema-tema utama terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam BUMDes dan

pengelolaan desa wisata. Tema-tema ini akan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan desa wisata.

Selain itu, analisis data juga akan dilakukan dengan memeriksa hubungan antara hasil observasi lapangan dan informasi yang diperoleh dari wawancara. Hasil analisis ini akan digunakan untuk merumuskan temuan utama penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan *good governance* dalam BUMDes "Mutiara Welirang", serta memberikan rekomendasi bagi pengelolaan desa wisata yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Temuan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik dalam pengelolaan BUMDes di Indonesia, khususnya dalam konteks pariwisata berbasis masyarakat.

Desa Ketapanrame memiliki luas wilayah ±345.462 Ha secara umum termasuk wilayah pegunungan karena terletak di daerah dataran tinggi berdasarkan ketinggian wilayah 800-1.000mdpl. Desa Ketapanrame berlokasi di wilayah Kecamatan Trawas

Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Desa Ketapanrame terdiri dari tiga dusun, yaitu 1) Dusun Ketapanrame, 2) Dusun Sukorame, dan 3) Dusun Slepri dengan total populasi penduduk pada ketiga dusun sebanyak 5604 orang. Desa Ketapanrame memiliki arah pengembangan desa yaitu 1) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan fokus mengatasi masalah pengangguran, 2) Pemberdayaan Masyarakat dengan mengadakan program BUMDes dalam urusan kewirausahaan dan sosial, serta 3) Pengembangan Potensi Desa dalam sektor pariwisata berfokus agar Desa Ketapanrame menjadi desa sejahtera dan mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ketapanrame memiliki luas wilayah ±345.462 Ha secara umum termasuk wilayah pegunungan karena terletak di daerah dataran tinggi berdasarkan ketinggian wilayah 800-1.000mdpl. Desa Ketapanrame berlokasi di wilayah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Desa Ketapanrame terdiri dari tiga dusun, yaitu 1) Dusun Ketapanrame, 2) Dusun Sukorame, dan 3) Dusun Slepri dengan total populasi penduduk pada ketiga dusun sebanyak 5604 orang. Desa Ketapanrame memiliki arah

pengembangan desa yaitu 1) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan fokus mengatasi masalah pengangguran, 2) Pemberdayaan Masyarakat dengan mengadakan program BUMDes dalam urusan kewirausahaan dan sosial, serta 3) Pengembangan Potensi Desa dalam sektor pariwisata berfokus agar Desa Ketapanrame menjadi desa sejahtera dan mandiri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Welirang berdiri sejak tahun 2001 dan telah memperoleh badan hukum nomor: AHU-05427.AH.01.33 dari Kemenkumham pada tahun 2022 dengan program dan arah pengelolaan pada aspek kewirausahaan dan aspek sosial masyarakat. BUMDes Mutiara Welirang memiliki slogan sebagai Badan Usaha Milik Desa yang hadir, berbuat, dan bermanfaat. Slogan tersebut berkaitan dengan pola pendirian BUMDes yaitu pola usaha bersama dengan masyarakat sehingga kehadiran BUMDes dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Desa (PAD).

BUMDes Mutiara Welirang terbagi dalam lima (5) unit usaha yang dibentuk dan didirikan berdasarkan masalah yang ada antara lain, 1) Unit Pengelolaan Air Minum Desa, 2) Unit Pengelolaan Kebersihan Lingkungan, 3)

Unit Permodalan dan Kemitraan, 4) Unit Pengelolaan Wisata Desa, dan 5) Unit Pengelolaan Kios dan Kandang Ternak. BUMDes Mutiara Welirang memiliki visi “*Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Perekonomian dan Peningkatan Layanan Dasar Masyarakat Desa*” dengan memiliki misi pendukung yaitu 1) Menciptakan lapangan pekerjaan, 2) memberikan pelayanan yang maksimal, 3) Menggali potensi untuk di dayagunakan, serta 4) Membuka pola wirausaha masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Welirang yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan perekonomian dan peningkatan layanan dasar masyarakat desa. BUMDes Mutiara Welirang merupakan wujud kesiapan pemerintah Desa Ketapanrame dalam upaya peningkatan perekonomian desa dengan melibatkan masyarakat setempat.

Hasil penelitian di lapangan mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* di BUMDes "Mutiara Welirang" di Desa Ketapanrame memberikan gambaran yang menarik mengenai bagaimana aspek-aspek tata kelola yang baik diterapkan dalam pengelolaan desa wisata berbasis partisipasi dan keberlanjutan. Penelitian

ini merujuk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh UN ESCAP, 2013 dalam Satpathy et al. (2013), yaitu: Konsensus, Partisipasi, Kepatuhan terhadap Hukum, Efektivitas dan Efisiensi, Akuntabilitas, Transparansi, Responsif, serta Keadilan dan Inklusivitas.

Berikut adalah analisis mengenai delapan prinsip *good governance* yang diterapkan di BUMDes "Mutiara Welirang".

Konsensus (*Consensus-Oriented*)

Prinsip konsensus diimplementasikan melalui musyawarah desa sebagai metode pengambilan keputusan utama. Musyawarah desa memungkinkan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh BUMDes. Musyawarah desa yang dilakukan oleh BUMDes sesuai dengan Peraturan Desa

Ketapanrame Nomor 2 tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mutiara Welirang Desa Ketapanrame atas permintaan pelaksana operasional, penasehat, dan/atau pengawas yang dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan difasilitasi oleh pemerintah desa.

Musyawarah desa terdiri atas (1) musyawarah desa tahunan yang dilakukan dengan agenda penyampaian laporan tahunan yang telah ditelaah untuk mendapat persetujuan musyawarah desa dan penetapan pembagian dan penggunaan hasil usaha, (2) musyawarah desa khusus yang dilaksanakan sewaktu-waktu dalam keadaan genting yang mengharuskan adanya keputusan segera dan wewenang terdapat pada musyawarah desa.

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>



Gambar 1.
Musyawarah desa tahunan
Sumber: Desa Ketapanrame, 2024

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa musyawarah desa merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh pemerintah desa Ketapanrame. Pada rapat tersebut membahas mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penetapan rencana kerja BUMDes Mutiara Welirang di tahun berikutnya. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, unsur masyarakat terdiri atas penyerta modal, perwakilan dusun atau RW atau RT, dan perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan usaha BUMDes.

Musyawarah desa ini menciptakan sebuah pendekatan berbasis kesepakatan bersama yang sangat penting dalam pengelolaan BUMDes, terutama dalam konteks desa wisata, dimana keberhasilan usaha sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, Desa Ketapanrame menunjukkan bahwa musyawarah desa yang dilakukan secara rutin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam keputusan yang berhubungan dengan pengembangan desa wisata. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa musyawarah tersebut benar-benar

mencakup seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya segelintir kelompok yang memiliki pengaruh lebih besar.

Partisipasi (*Participatory*)

Prinsip partisipasi yang diterapkan di BUMDes "Mutiara Welirang" menunjukkan bahwa setiap anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pengelolaan semua unit usahanya. Partisipasi masyarakat ini diatur dalam Peraturan Desa Ketapanrame Nomor 2 Tahun 2022 bahwa masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan semua unit usaha yang ada pada BUMDes Mutiara Welirang yaitu 1) Unit Pengelolaan Air Minum Desa 2) Unit Pengelolaan Kebersihan Lingkungan, 3) Unit Permodalan dan Kemitraan, 4) Unit Pengelolaan Wisata Desa, dan 5) Unit Pengelolaan Kios dan Kandang Ternak.

Partisipasi masyarakat dalam setiap unit BUMDes telah berkontribusi dengan baik dimana masyarakat desa yang dulunya bekerja informal sekarang dapat menjadi pengusaha di beberapa aspek terkait unit-unit BUMDes karena keterlibatan dari masyarakat meningkatkan tingkat pengetahuan yang berdampak dalam upaya peningkatan ekonomi.

Proses partisipasi masyarakat ini tidak hanya terbatas pada pengambilan

keputusan, tetapi juga mencakup pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pengembangan semua unit usaha BUMDes. Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendukung pengelolaan unit usaha BUMDes pada wisata desa. Masyarakat dilibatkan dalam pemanfaatan potensi lokal, seperti kerajinan tangan dan produk lokal yang dapat dijual kepada wisatawan. Dengan demikian, prinsip partisipasi ini memberikan dampak langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Salah satu contoh keberhasilan BUMDes Mutiara Welirang dalam melibatkan peran masyarakat adalah dengan menyediakan gubug UMKM yang bisa disebut sebagai sentra oleh-

oleh karena digunakan masyarakat untuk berjualan oleh-oleh sebagai kompensasi bagi masyarakat desa sebagai pemilik sawah yang digunakan sebagai objek wisata Sumber Gempong.

Sedangkan untuk masyarakat desa yang bukan sebagai pemilik sawah diperbolehkan untuk menitipkan makanan kepada pemilik gubug seperti keripik yang ditawarkan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan. Menariknya produk yang dijual di gubug UMKM tersebut adalah hasil dari kemampuan BUMDes dalam menggunakan potensi desa yaitu Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada karena oleh-oleh yang ditawarkan pada pengunjung adalah hasil buatan tangan (*homemade*) Masyarakat desa serta hasil panen berupa rempah-rempah dan umbi-umbian.

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>



Gambar 2.
Gubug UMKM

Sumber: Dokumentasi penulis, 2024

Namun, pengimplementasian partisipasi dalam beberapa kasus masih menemui kendala, terutama terkait dengan rendahnya tingkat partisipasi dari sebagian warga desa yang kurang memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam program-program BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dalam mengedukasi dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam proses pengelolaan desa wisata.

Kepatuhan terhadap Hukum (*Follows the Rule of Law*)

Kepatuhan terhadap hukum adalah salah satu aspek krusial dalam menerapkan prinsip *good governance*. Dalam hal ini, BUMDes "Mutiara Welirang" di Desa Ketapanrame mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Proses perizinan untuk pengembangan desa wisata,

pemanfaatan sumber daya alam, dan pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini menjamin bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh BUMDes tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar-dasar hukum yang berlaku di BUMDes Mutiara Welirang sudah diimplementasikan dengan baik dimulai dari pembentukan, kepengurusan dan pengelolaan BUMDes semua berlandaskan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Struktur kepengurusan BUMDes Mutiara Welirang yang memiliki tujuan dalam memperjelas pembagian tugas sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran sesuai tanggung jawab bidang masing-masing. Berikut gambar struktur organisasi pada BUMDes Mutiara Welirang:



Gambar 3.

Struktur organisasi BUMDes Mutiara Welirang
Sumber: BUMDes Mutiara Welirang, 2024

Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam hal kepatuhan terhadap hukum adalah seringnya adanya perubahan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah yang mempengaruhi operasional BUMDes. Untuk itu, pengelola BUMDes perlu memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan yang berlaku serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Selain itu, perlu ada pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah desa untuk memastikan bahwa BUMDes tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga mengimplementasikan peraturan secara efektif.

Efektivitas dan Efisiensi (*Effective and Efficient*)

Prinsip efektivitas dan efisiensi diterapkan dengan baik dalam pengelolaan BUMDes "Mutiar Welirang". Salah satu aspek utama yang menjadi fokus adalah pengelolaan sumber daya alam yang ada di Desa Ketapanrame, seperti lahan pertanian dan potensi wisata alam. BUMDes berusaha untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara maksimal namun tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pengelolaan keuangan yang efisien juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa dana

yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengembangan desa wisata.

Pengurus BUMDes Mutiar Welirang beserta Pemerintah Desa telah menyusun program kerja yang didukung dengan modal, Sumber Daya Manusia (SDM), dan budaya perusahaan yang kokoh serta melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUMDes memberikan kepuasan pada semua *stakeholders*. Pada tahun 2023 BUMDes Mutiar Welirang telah meningkatkan dan mengoptimalkan beberapa potensi unit usahanya yaitu usaha di unit pengelolaan wisata, pada bidang jasa yaitu unit pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, dan pembayaran secara *online* unit pada simpan pinjam dan kemitraan akan dikembangkan sehingga masyarakat akan dipermudah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan pada bidang industri yaitu unit pengelolaan kios dan kandang ternak adalah mengembangkan inovasi yang diinginkan pasar dalam pengelolaan kios bagi masyarakat.

Dengan demikian, pengelolaan dana yang telah dilakukan dengan hati-hati masih dijumpai tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan dana untuk pengembangan infrastruktur yang lebih besar. Oleh karena itu, BUMDes perlu

mencari sumber pendanaan tambahan, seperti melalui kemitraan dengan pihak swasta, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional yang lebih optimal.

Akuntabilitas (*Accountable*)

Prinsip akuntabilitas tercermin dari pengelolaan keuangan BUMDes yang dilakukan secara transparan dan terbuka. Setiap laporan keuangan dan hasil kegiatan desa wisata dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Audit internal dan eksternal dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan BUMDes dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hal ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban BUMDes Mutiara Welirang terhadap masyarakat adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan program kerja yang disusun setiap tahun sebagai bentuk

pertanggung jawaban pengurus BUMDes serta pemerintah desa dalam setiap tahunnya sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan dan sebagai acuan dasar dalam pembuatan program kerja di tahun berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak BUMDes Mutiara Welirang merupakan bukti keseriusan pengurus BUMDes dalam merealisasikan anggaran tiap tahunnya yang digunakan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana program kerja yang dirancang setiap tahun sebagai upaya pengembangan usaha di bidang jasa pelayanan, wisata serta industri yang disusun dengan mencantumkan peluang, kekurangan serta prospek usaha sehingga dalam merealisasikan program kerja tersebut pihak BUMDes Mutiara Welirang akan tetap berfokus dalam pengembangan masyarakat yang meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>



Gambar 4.

Laporan Pertanggungjawaban tahun 2023 dan Program Kerja tahun 2024

Sumber: BUMDes Mutiara Welirang, 2024

Berdasarkan indikator akuntabilitas tantangan yang dihadapi pihak BUMDes adalah memastikan bahwa sistem akuntabilitas ini dapat diakses dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Beberapa masyarakat desa mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai laporan keuangan atau kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes sehingga dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan BUMDes.

Transparansi (*Transparent*)

Prinsip transparansi diterapkan dengan membuka akses informasi mengenai kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan BUMDes kepada masyarakat. Rapat musyawarah desa yang melibatkan warga desa merupakan salah satu forum untuk memastikan bahwa informasi mengenai kegiatan BUMDes disampaikan dengan jelas dan terbuka. Transparansi ini juga mencakup pengelolaan dana desa yang dipublikasikan melalui berbagai saluran informasi.

Transparansi yang telah dilakukan BUMDes Mutiara Welirang Desa Ketapanrame dirasakan hampir 90% warga masyarakat untuk semua unit usaha BUMDes. Hal ini dibuktikan dengan wawancara oleh salah seorang

penjual camilan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada BUMDes serta Pemerintah Desa sangat tinggi dibuktikan dengan pendapatan serta pembelanjaan anggaran yang setiap tahunnya dibuat laporan pertanggungjawaban bahkan dicetak di kantor desa agar dapat dilihat oleh seluruh masyarakat desa.

Transparansi pemerintah Desa Ketapanrame termuat dalam website resmi <https://ketapanrame.desa.id/> yang dapat diakses secara terbuka terdapat catatan mengenai anggaran yang digunakan oleh BUMDes Mutiara Welirang dalam satu tahun program kerja dalam realisasi program kerja di masing-masing unit. Website yang dimiliki oleh Desa Ketapanrame menjadi bukti bahwa pemerintah desa juga telah mengembangkan kemampuan dalam digitalisasi sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi lebih luas.



Gambar 5.
Realisasi APBDesa 2023 dan 2024
Sumber: Desa Ketapanrame, 2024

Responsif (*Responsive*)

BUMDes "Mutiara Welirang" menunjukkan sikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik dalam hal pengelolaan desa wisata maupun dalam merespons keluhan dan masukan dari masyarakat. Pengelola BUMDes selalu berusaha untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik terkait dengan infrastruktur, ekonomi, maupun sosial.

Pembentukan unit usaha BUMDes Muatiara Welirang berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat, antara lain: 1. Unit Pengelolaan air minum. Pendiannya dilatarbelakangi karena kekhawatiran warga pada pengelolaan aset desa oleh kelompok masyarakat KP-SPAM pada pemanfaatan sumber mata air desa dan

jaringan air minum. Hal ini ditindaklanjuti dengan musyawarah desa pada 23 Agustus 2015 yang menghasilkan kesepakatan didirikannya BUMDes unit air minum BPAM Tirto Tentrem agar aset air desa dapat dijadikan aset desa. Sampai saat ini BUMDes unit pengelolaan air minum telah melayani masyarakat desa serta pemilik usaha penginapan di desa Ketapanrame; 2. Unit Pengelolaan sampah dan Kebersihan Lingkungan. Latar belakang pendiriannya didasarkan oleh keinginan pemerintah desa bagi masyarakat dan membantu pemerintah kabupaten dalam proses pengolahan sampah sehingga sampah yang berasal dari Desa Ketapanrame dapat diolah menjadi sampah yang diambil dari masyarakat desa kemudian dipilah menjadi sampah

plastik dan organik. Sampah plastik akan dipisahkan lalu dijual kepada pihak pihak yang telah bekerja sama sedangkan untuk sampah organik diolah pekerja unit pengelolaan sampah unuk budidaya magot.h oleh pemerintah desa dan tidak menyumbang sampah di kabupaten Mojokerto; 3. Unit Pengelolaan wisata desa. Sektor pariwisata menjadi faktor utama dalam peningkatan pendapatan desa dan berdampak bagi ekonomi masyarakat. Dengan latar belakang letak geografis Desa Wisata Ketapanrame di daerah dataran tinggi dan mata pencaharian masyarakat sebagai petani peran Pemerintah Desa dalam mendirikan unit wisata ini sebagai realisasi terhadap pengembangan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dan didukung oleh keterlibatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari masyarakat Desa Wisata Ketapanrame; 4. Unit Simpan Pinjam dan Kerjasama. Unit BUMDes ini dibentuk pada tahun 2020 untuk menangani usaha simpan pinjam sebagai pemenuhan modal usaha masyarakat. Dalam sektor Kerjasama BUMDes telah bekerjasama dengan beberapa pihak terkait dalam pengelolaan wana wisata air terjun, bumi perkemahan, dan angkutan wisata; 5. Unit Pengelolaan Kios dan Kandang Ternak. Pengelolaan

ini menggunakan Tanah Kas Desa sebagai usaha persewaan kios dan kandang ternak. Pengelolaan kandang ternak berfokus khususnya sapi dan kambing serta limbah yang dihasilkan oleh ternak juga dikembangkan menjadi sentra pembuatan kompos dan menghasilkan nilai komersial. Sedangkan unit pengelolaan kios sebagai sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat khususnya menjual oleh-oleh dapat berdampak juga bagi wisata sumber gempong sehingga wisata desa semakin berkembang dan ekonomi masyarakat meningkat.

Tantangan masih dijumpai dalam pengelolaan BUMDes yaitu hal mempercepat respons terhadap masalah yang terjadi, terutama dalam situasi yang mendesak. Untuk itu, BUMDes perlu meningkatkan sistem komunikasi dan mekanisme penanganan masalah yang lebih cepat dan efisien.

Keadilan dan Inklusivitas (Equitable and Inclusive)

Prinsip ini diterapkan dengan memastikan bahwa manfaat dari pengembangan desa wisata dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. BUMDes "Mutiara Welirang" berusaha untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam pengelolaan desa wisata, dengan

memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Namun, ada tantangan dalam hal memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan BUMDes dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata, terutama bagi kelompok-kelompok yang lebih marginal atau terpinggirkan.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes "Mutiara Welirang" di Desa Ketapanrame menunjukkan kemajuan dalam meningkatkan daya saing desa wisata. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat, pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, serta memastikan keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan desa wisata. Dengan terus meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dan memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik, diharapkan Desa Ketapanrame dapat menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam mengembangkan potensi wisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Penerapan musyawarah desa dalam pengambilan keputusan di Desa Ketapanrame, yang sesuai dengan prinsip konsensus dalam model *good*

governance oleh UNESCAP (Satpathy et al., 2013). Musyawarah desa yang dilaksanakan setiap tahun dan sesekali dalam keadaan genting mencerminkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini juga sejalan dengan studi Afero et al. (2022) yang menyebutkan pentingnya pengambilan keputusan berbasis konsensus dalam kerangka desentralisasi, di mana keputusan-keputusan strategis mengenai pengelolaan sumber daya desa harus melibatkan semua pemangku kepentingan.

Musyawarah desa yang menjadi forum utama bagi warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Ketapanrame, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen, memperlihatkan penerapan prinsip partisipasi yang juga diakui dalam literatur seperti yang ditulis oleh Afrizal et al. (2023). Penelitian mereka menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes yang sukses sangat bergantung pada partisipasi aktif warga desa. Hal ini memperkuat argumen bahwa BUMDes yang berhasil perlu mendapat dukungan masyarakat dalam berbagai tahap pengambilan keputusan.

Musyawarah desa tidak hanya yang mencerminkan prinsip partisipatif, tetapi juga adanya transparansi dalam

pelaporan tahunan dan penggunaan hasil usaha. Hal ini mendukung argumen dalam referensi Kurniasih dan Israwan Kurniasih & Israwan Setyoko (2019) yang menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat penting untuk memastikan akuntabilitas serta membangun kepercayaan di kalangan masyarakat desa.

Penelitian ini juga mengindikasikan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban dalam operasional BUMDes yang diatur melalui mekanisme musyawarah desa, di mana laporan tahunan harus ditelaah dan disetujui oleh warga. Ini sejalan dengan temuan Kurniasih dan Israwan Setyoko (2019) yang menekankan pentingnya kapasitas pemerintah desa dalam mengelola BUMDes dengan akuntabilitas yang jelas untuk mencapai tata kelola yang baik.

Penggunaan prinsip efektif dan efisien dapat dilihat dalam struktur musyawarah desa yang memungkinkan proses pengambilan keputusan cepat dan tepat dalam situasi mendesak. Hal ini sesuai dengan temuan dalam penelitian Armi dan Nurmahmudah (2023) yang menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes secara efektif dan efisien memerlukan respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

Beberapa batasan yang ada dalam penelitian ini perlu dicatat, antara lain keterbatasan lokasi yang hanya mencakup Desa Ketapanrame sebagai satu studi kasus. Meskipun desa ini menjadi contoh yang representatif, hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke desa-desa lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada aspek tata kelola BUMDes dan belum membahas secara mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas dari pengelolaan desa wisata. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi pengaruh pengelolaan desa wisata terhadap masyarakat secara lebih komprehensif, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Mutiara Welirang" di Desa Ketapanrame, yang berfokus pada peningkatan daya saing desa wisata. Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*, penelitian ini menemukan bahwa BUMDes "Mutiara Welirang" telah menerapkan sebagian besar

prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dengan beberapa aspek yang telah berjalan dengan baik dan beberapa yang masih memerlukan perbaikan.

Prinsip konsensus dan partisipasi terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata, melalui mekanisme musyawarah desa yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Hal ini memberikan rasa kepemilikan yang kuat terhadap pengelolaan desa wisata, serta meningkatkan keberlanjutan usaha yang dikelola oleh BUMDes.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan dalam pengelolaan BUMDes ternyata masih ada kekurangan dalam indikator aksesibilitas informasi bagi masyarakat yang kurang teredukasi atau kurang memahami laporan keuangan masih menjadi hambatan. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama terkait dengan keterbatasan keterampilan manajerial dalam mengelola desa wisata, turut memperburuk pengelolaan yang tidak optimal. Hal ini juga berhubungan dengan keterbatasan dana yang tersedia untuk pengembangan infrastruktur desa wisata yang lebih maju.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan ini masih ada, penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes "Mutiar Welirang" sudah memberikan dampak positif bagi peningkatan daya saing Desa Ketapanrame sebagai desa wisata. Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai peningkatan kapasitas pengelola, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada BUMDes "Mutiar Welirang" di Desa Ketapanrame, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan pengelolaan dan daya saing desa wisata tersebut.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal pengelolaan BUMDes dan desa wisata menjadi tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan manajerial bagi pengelola BUMDes perlu ditingkatkan. Pengelola BUMDes dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata harus dibekali dengan keterampilan dalam manajemen keuangan, pemasaran pariwisata,

komunikasi, serta teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Pelatihan mengenai customer service dan pengelolaan produk wisata juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan.

Selain itu, pembentukan tim pengelola yang memiliki keahlian spesifik dalam bidang pariwisata akan sangat membantu dalam meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan desa wisata. Pemuda desa yang memiliki potensi di bidang ini bisa dilibatkan dalam tim pengelola untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pengelolaan.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Meskipun laporan keuangan dan pengelolaan BUMDes sudah dilaksanakan secara transparan, banyak anggota masyarakat yang belum memahami sepenuhnya laporan keuangan yang ada. Untuk itu, BUMDes "Mutiara Welirang" perlu menyelenggarakan sosialisasi rutin mengenai laporan keuangan, termasuk cara membaca dan memahami laporan tersebut, baik secara langsung dalam pertemuan desa maupun melalui media lainnya, seperti media sosial atau aplikasi berbasis teknologi yang dapat

mempermudah akses informasi bagi masyarakat.

BUMDes juga bisa meningkatkan akuntabilitasnya dengan melibatkan masyarakat dalam audit keuangan yang dilakukan secara terbuka, serta membuat laporan tahunan yang dapat diakses oleh seluruh warga desa. Hal ini akan membantu masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan BUMDes, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan dana atau pengelolaan yang tidak efisien.

Diversifikasi Sumber Pendanaan

Keterbatasan dana untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas desa wisata menjadi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing. Untuk itu, BUMDes "Mutiara Welirang" perlu mencari sumber pendanaan alternatif yang lebih beragam. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengajukan program pendanaan berbasis komunitas atau crowdfunding yang melibatkan masyarakat desa dan pendukung eksternal. BUMDes juga bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana hibah atau bantuan yang khusus ditujukan untuk pengembangan desa wisata.

Selain itu, menggali kemitraan dengan sektor swasta atau investor lokal untuk pengembangan fasilitas desa wisata, seperti penginapan, pusat oleh-oleh, dan fasilitas lainnya, juga dapat menjadi salah satu strategi dalam memperkuat sumber pendanaan.

Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Desa Wisata

Peningkatan infrastruktur desa wisata sangat penting untuk menarik lebih banyak wisatawan dan memperbaiki kualitas pengalaman wisata. Oleh karena itu, perbaikan akses jalan menuju lokasi wisata, penyediaan fasilitas umum seperti toilet, tempat parkir yang memadai, dan peningkatan fasilitas penginapan harus menjadi prioritas. Pembangunan fasilitas yang ramah lingkungan, seperti tempat sampah terpisah untuk daur ulang, serta penggunaan sumber energi terbarukan (seperti solar panel) bisa menjadi nilai tambah yang menarik bagi wisatawan yang peduli terhadap isu keberlanjutan.

Selain itu, pembangunan fasilitas digital seperti akses *Wi-Fi* di area wisata atau pengembangan aplikasi berbasis informasi desa wisata akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wisatawan, serta mempermudah promosi dan pemasaran *online*.

Pemanfaatan Teknologi untuk Pemasaran dan Promosi

Menggunakan teknologi digital dalam pemasaran desa wisata sangat penting untuk memperluas jangkauan pasar. BUMDes "Mutiara Welirang" dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk memperkenalkan potensi wisata Desa Ketapanrame secara lebih luas. Pembuatan konten yang menarik, seperti video dokumenter atau cerita visual yang menggambarkan keindahan alam, budaya, dan kegiatan masyarakat, bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun internasional.

Selain itu, pengembangan website resmi untuk desa wisata yang menyediakan informasi lengkap mengenai tempat wisata, penginapan, kuliner, dan aktivitas lainnya, akan sangat membantu wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka. Dengan meningkatkan visibilitas secara online, BUMDes dapat menarik lebih banyak wisatawan dan memperkenalkan Desa Ketapanrame sebagai destinasi wisata yang unik.

Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan

Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan desa wisata, dari perencanaan hingga evaluasi, perlu

ditingkatkan. BUMDes harus terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam kegiatan wisata dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari warga desa untuk mengelola sektor-sektor tertentu, seperti kuliner, kerajinan, atau penginapan, yang akan membantu meningkatkan keterlibatan mereka secara langsung dalam bisnis pariwisata.

Penerapan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas seperti pelatihan kerajinan tangan, pemandu wisata lokal, atau pengelolaan warung makan khas desa akan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini juga akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap keberhasilan desa wisata dan BUMDes.

Penerapan Prinsip Keberlanjutan

BUMDes "Mutiara Welirang" perlu memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan desa wisata. Hal ini mencakup pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan, seperti konservasi alam, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan sampah yang efisien.

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan akan sangat penting dalam menjaga kelestarian alam Desa Ketapanrame, yang merupakan daya tarik utama wisatawan.

Pada tahap akhir untuk memastikan bahwa desa wisata ini tetap berkelanjutan, BUMDes perlu mengembangkan strategi jangka panjang yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas pariwisata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan artikel ini dimulai dari Pemerintah Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Mojokerto, pengurus BUMDes Mutiara Welirang dan seluruh narasumber terkait serta seluruh jajaran Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah terutama dosen pengampu mata kuliah Administrasi Badan Usaha Sektor Publik yang senantiasa membantu dengan sabar untuk menyelesaikan artikel ini.

REFERENSI

- Afero, D., Rosalia, F., & Budiono, P. (2022). Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 1(2), pp. 151–159. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1136>
- Afrizal, Rahmatunnisa, M., Suwaryo, U., & Yuningsih, N. Y. (2023). Local Government Capability in Managing Village Owned Enterprises (BUMDes) in Indonesia: A Case Study of Bintan Regency. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 21(3), pp. 707–727. [https://doi.org/10.4335/21.3.707-727\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.3.707-727(2023))
- Armi, M., & Nurmahmudah, N. (2023). Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) for Prosperity through Community Services (Case Study in Damarwulan Village, Kepung District, Kediri Regency). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), pp. 432–438. <https://doi.org/10.32815/jpm.v4i2.611>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publication. <https://drive.google.com/file/d/1NCokfEqfNtsCXbSemWEoqzjbEO13mXOV/view>
- Kurniasih, D., & Israwan Setyoko, P. (2019). Public Governance Capacity in The Accountability of Village-Owned Enterprise Management in Indonesia. *Journal Sampurasun: Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage*, 5(2). <https://doi.org/10.23969/sampurasun.v5i2.1745>
- Pertiwi, V. A., Pratiwi, D. E., & Meitasari, D. (2023, March 1). Human Resource Management of Agrotourism-based BUMDes (Township and Village Enterprise) on Rural Community Empowerment. *Nusantara Science and Technology Proceedings*. <https://doi.org/10.11594/nstp.2023.3210>
- Satpathy, B., Muniapan, B., & Dass, M. (2013). UNESCAP's characteristics of good governance from the philosophy of Bhagavad-Gita and its contemporary relevance in the Indian context. *International Journal of Indian Culture and Business Management*, 7(2), p. 192. <https://doi.org/10.1504/IJICBM.2013.055504>
- Andriyanti, T., Anggraeni, S., Taufik, W., & Lubis, L. (2024). Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Melalui BUMDes di Desa Suruh Kabupaten Trenggalek. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1). <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1198>
- Astuti, P. Y., Tamala, Y. F., & Mafruhat, A. Y. (2022). Tantangan dan Peluang Percepatan Pengembangan BUMDES Menuju Status Berkembang dan Maju di Kabupaten Cilacap. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 127–142. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1168>
- Devina, F., Dina, A., Taufik, W., & Lubis, L. (2024). Strategi BUMDes dalam Pengelolaan Kampung Etawa di Desa Suruh Kabupaten Trenggalek. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(01).

- Muhaimin, H. (2019). Tata Kelola Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), pp. 1–12. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.296>
- Prasetyo, A. A., & Sukmana, H. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Sumber Gempong di Desa Ketapanrame. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.1893>
- Yin, R. K. (2008). *Studi kasus desain dan metode*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah